

## **PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMELIHARAAN HALTE DI KOTA SAMARINDA**

**Diani Maya Sari<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Diani Maya Sari, “Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda”, dibawah bimbingan yang saya hormati Ibu Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Santi Rande, S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing II.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda, dan untuk mengidentifikasi gambaran apa saja yang menjadi faktor penghambat Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda.*

*Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian dalam skripsi ini mengacu pada kegiatan utama Dinas Perhubungan di Kota Samarinda. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan key informan dan informan, dan data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen Dinas Perhubungan di Kota Samarinda maupun dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data interaktif oleh Milles, Huberman dan Saldana.*

*Berdasarkan hasil penelitian dilapangan Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samrinda terkait kegiatan monitoring, evaluasi dan rehabilitasi dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari ketidaklayakan halte yang ada di Kota Samarinda karena kurangnya kegiatan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan.*

*Faktor penghambat Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda adalah dalam melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan rehabilitasi Dinas Perhubungan masih kurang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dimana dengan banyaknya jumlah halte yang ada Dinas Perhubungan memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia nya. Selain keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan APBD Kota Samarinda termasuk dengan dana-dana lainnya yang untuk membangun Kota Samarinda mengalami penurunan dan itu berimbas juga kepada semua sektor salah satunya adalah sektor perhubungan dalam hal ini adalah*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

*infrastruktur halte juga mengalami penurunan terhadap anggaran pemeliharaan.*

***Kata Kunci: Peranan Dinas Perhubungan, Pemeliharaan Halte***

## **PENDAHULUAN**

### ***Latar Belakang***

Kota Samarinda merupakan Ibukota dari provinsi Kalimantan Timur yang memiliki visi untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang berbasis industri, perdagangan, dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu merawat dan menjaga fasilitas prasarana lalu lintas yang dimiliki guna menunjang pergerakan pelayanan jaringan transportasi darat di Kota Samarinda.

Fasilitas Prasarana lalu lintas tersebut yaitu meliputi bangunan halte. Secara umum prasarana halte adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Prasarana halte tentu perlu diperhatikan lebih guna menunjang transportasi, khususnya transportasi darat di Kota Samarinda karena prasarana halte dibuat untuk mendukung transportasi.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan masih banyak dari fasilitas prasarana lalu lintas yang tidak terpelihara dengan baik, khususnya bangunan halte yang terdapat di Kota Samarinda masih jauh dari keinginan pemerintah dan masyarakat. Halte merupakan salah satu fasilitas prasarana lalu lintas kota yang berfungsi sebagai tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang ini tidak terawat dengan baik. Bangunan halte pun kini selain dirusak tangan-tangan jahil, halte juga sering dijadikan lapak pedagang, aktivitas di pasar malam menjadi pemicu adanya pedagang yang menguasai halte. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan mengingat kurangnya tindakan dari Dinas Perhubungan dalam memelihara prasarana halte tersebut.

Dinas Perhubungan banyak memiliki program di dalam membangun prasarana halte sehingga banyak fasilitas yang sudah dibangun tidak terawat dengan baik. Dari banyaknya fasilitas yang tidak terawat dengan baik, Dinas Perhubungan terkesan hanya membangun fasilitas yang ada tetapi tidak memelihara fasilitas tersebut untuk kemudahan jaringan transportasi darat di Kota Samarinda. Hal tersebut juga terlihat dari patroli yang kurang maksimal dikarenakan Dinas Perhubungan hanya memiliki kendaraan 4 unit roda 4 dan 7 unit roda 2 untuk mengawasi lalu lintas serta Sarana dan Prasarana transportasi darat. Tentu saja hal tersebut sangat kurang untuk mengawasi fasilitas yang ada

dalam rangka pemeliharaan fasilitas prasarana transportasi darat yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka masalah yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor penghambat Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda ?

### ***Tujuan Penelitian***

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi gambaran apa saja yang menjadi faktor penghambat Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda.

### ***Manfaat Penelitian***

Pada umumnya setiap penelitian yang dilakukan hasilnya di harapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik bagi peneliti maupun bagi pihak lain. Adapun kegunaan penelitian yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori mengenai Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda.
  - b. Untuk melatih penulis berpikir dalam memecahkan masalah yang tumbuh, dengan melalui proses penelitian.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya institusi pemerintah untuk peranan Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan halte di Kota Samarinda.
  - b. Sebagai sumber informal dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.
  - c. Sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## ***TINJAUAN PUSTAKA***

### ***Teori dan Konsep***

#### ***Organisasi***

Organisasi adalah segenap proses kegiatan menerapkan dan membagi pekerjaan, pendelegasian wewenang, tugas dan tanggung jawab, serta penetapan antar unit atau pejabat-pejabat dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Mufiz dalam Sukidin, 2011:199).

### ***Peranan***

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apa bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2010:212).

### ***Pembangunan***

Menurut Haryono (2002:17) pembangunan adalah merupakan suatu proses konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

### ***Infrastruktur***

Menurut Grigg (dalam Kodoatie, 2005:8), infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

### ***Kebijakan Publik***

Menurut James Anderson dalam Solichin (2002:2) “Kebijakan adalah perilaku dari semua aktor (pejabat, kelompok, instansi, pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”. Sedangkan Thomas Dye dalam Said Zainal Abidin (2006:20) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

### ***Pemeliharaan***

Menurut Sofyan Assauri (2004 : 95) pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

### ***Tupoksi Dinas Perhubungan***

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008, Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan perhubungan darat, lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem jaringan jalur perkeretaapian dan pengelolaannya,

perhubungan laut, perhubungan udara, pengendalian dan operasional perhubungan sesuai manajemen rekayasa lalu lintas perhubungan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### ***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan konsep yang dijelaskan diatas adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda adalah perilaku yang diharapkan dari Dinas Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya dengan cara melakukan Monitoring, Evaluasi dan Rehabilitasi yang bertujuan untuk selalu memelihara serta merawat dan menjaga fasilitas prasarana lalu lintas halte.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara obyektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuaan yang ditekuni.

### ***Fokus Penelitian***

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda, yaitu:
  - a. Monitoring
  - b. Evaluasi
  - c. Rehabilitasi
2. Faktor penghambat Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda.

### ***Sumber Data***

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Bidang Sarana dan Prasarana & staff Bidang Sarana dan Prasarana, serta yang menjadi *informan* lain yaitu masyarakat yang sedang menunggu angkutan umum di halte.

### ***Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan di beberapa titik halte di Kota Samarinda.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Pada penelitian ini penulis milih teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan triangulasi (gabungan keempatnya).

### ***Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis Data Model Interaktif oleh Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. Sebagaimana di katakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Collection*, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications* yang dapat digambarkan pada gambar 3.1 (Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, 2014:31-33)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda***

Lokasi penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan salah satu instansi teknis dimana dalam melaksanakan tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kinerja dan pelayanannya dapat langsung dirasakan oleh segala lapisan masyarakat.

### ***Prasarana Halte***

Menurut keputusan DEPHUB 27/HK. 105/DRJD/96 “Halte” adalah tempat menaikan dan menurunkan penumpang dari angkutan umum dimana pun berada. Bangunan halte dapat berupa rambu lalu lintas atau sebuah tempat yang dilengkapi dengan atap dan tempat duduk.

Untuk menerapkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda dalam mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota metropolitan menjadi tujuan pembangunan halte untuk :

1. Menjamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
2. Menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan penumpang umum.
3. Menjamin kepastian keselamatan untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
4. Memudahkan penumpang dalam melakukan perpindahan moda angkutan umum.

Di Kota Samarinda sendiri, salah satu hal yang kurang mendapat perhatian adalah tidak adanya pemeliharaan fungsi halte. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu memrogramkan beberapa kegiatan pemeliharaan halte sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya karena fungsi halte perlu dibangun kembali dan dimaksimalkan.

### **1. *Monitoring***

Keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Monitoring pada umumnya dilakukan baik pada waktu sebelum kegiatan pembinaan maupun bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan

pembinaan. Monitoring sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaannya secara mantap, teratur dan terus-menerus dengan cara mendengar, melihat dan mengamati, serta mencatat keadaan serta perkembangan program tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa dari segi monitoring terhadap halte dalam hal pemeliharaan yang ada di Kota Samarinda dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak lain karena terbatas pada tenaga atau sumberdaya manusia yang ada di Dinas Perhubungan. Pengawasan tidak dilaksanakan secara maksimal hal ini diketahui dari ungkapan masyarakat yang berada di halte tersebut.

Mengacu pada fokus penelitian yang berdasar pada tugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda monitoring atau pengawasan yang sebenarnya dilakukan setiap terjadi laporan masyarakat terhadap halte namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Dinas Perhubungan dengan alasan ada yang lebih diprioritaskan dalam pengawasannya belum lagi terbentur masalah jumlah sumberdaya manusia yang kurang dalam pengawasan. Pengawasan yang dilakukan menunggu informasi dari masyarakat atau pada saat kebetulan lewat saja.

## **2. *Evaluasi***

Evaluasi program merupakan salah satu fungsi dari manajemen program, evaluasi program dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi program harus dan dapat diselenggarakan secara terus menerus, berkala, dan atau sewaktu-waktu. Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan pada saat sebelum, sedang, atau setelah program dilaksanakan, evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, maka dapat dilihat bahwa evaluasi dibentuk dalam rap rap (catatan kecil) pembukuan dari laporan-laporan masyarakat dan dari pegawai Dinas Perhubungan itu sendiri. Hal ini belum mampu mengevaluasi keseluruhan halte dikarenakan pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat dan pengawasan sekilas yang dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan. Selain itu, pencatatan yang dilakukan berdasarkan laporan dan pengawasan sekilas tidak bisa memberikan evaluasi yang maksimal terhadap pemeliharaan halte yang sudah rusak.

Evaluasi ini bertujuan untuk terpeliharanya halte yang ada di Kota Samarinda mulai dari terpenuhinya keinginan masyarakat sampai pada peranan Dinas Perhubungan itu sendiri dalam menciptakan kenyamanan bagi masyarakat melalui monitoring, evaluasi dan rehabilitasi terhadap pemeliharaan halte yang ada di Kota Samarinda.

### **3. *Rehabilitasi***

Secara umum rehabilitasi sendiri adalah suatu proses perbaikan atau pemulihan dari kondisi yang tidak normal menjadi normal, ataupun merupakan pelatihan untuk menghadapi kondisi yang mungkin sudah tidak bisa dikembalikan menjadi normal seperti kerusakan pada bangunan dan lain sebagainya. Kegunaan rehabilitasi sendiri adalah agar bangunan dapat segera difungsikan kembali seperti awalnya. Tindakan rehabilitasi terpaksa harus dilakukan bila terjadi hal-hal yang menyimpang dari rencana semula, baik akibat kesalahan, kelalaian ataupun akibat terjadinya bencana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa rehabilitasi belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Karena dalam hal ini terkendala kurangnya anggaran yang dimiliki Dinas Perhubungan. Karena masih ada yang perlu di prioritaskan terlebih dahulu selain halte yang ada. Dalam pelaksanaannya sejauh ini tidak ada yang direhabilitasi baik dari bentuk mau pun tata letak.

#### ***Faktor Penghambat Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda***

Dalam melaksanakan tugas pemeliharaan halte, Dinas Perhubungan Kota Samarinda tidak lepas dari kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan merupakan sesuatu yang harus dihadapi tentunya dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan Faktor penghambat. Faktor penghambat di hadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan halte secara keseluruhan adalah, sebagai berikut :

1. Penghambat peranan Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan halte di Kota Samarinda dalam memonitoring adalah kurangnya tenaga sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sehingga belum mampu jika harus memonitoring banyaknya jumlah halte yang ada di Kota Samarinda. Karena tanpa ketersediaannya sumberdaya manusia yang cukup dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana halte maka proses pemeliharaan juga akan tersendat sehingga menyebabkan kondisi halte menjadi kurang layak.
2. Penghambat peranan Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan halte di Kota Samarinda dalam mengevaluasi adalah pemanfaatan dari fungsi prasarana halte kini sudah menurun karena tidak ada ketentuan dari Dinas Perhubungan bagi masyarakat untuk menunggu angkutan umum di halte, berkurangnya minat masyarakat dalam menggunakan fasilitas halte pun kini membuat bangunan halte beralih fungsi menjadi lapak bagi para PKL untuk menjajakan dagangannya. Kondisi ini dikarenakan masyarakat lebih memilih memakai kendaraan pribadi dibandingkan menunggu angkutan umum di halte.
3. Faktor utama penghambat peranan Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan halte di Kota Samarinda dalam merehabilitasi adalah keterbatasan anggaran. Karena semua kegiatan mulai monitoring, evaluasi sampai pada rehabilitasi



mebutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya. Sehingga Dinas Perhubungan memerlukan pihak ketiga seperti masyarakat dan para pengusaha untuk turut membantu merawat dan memelihara prasarana halte, tetapi tentu saja bantuan dari pihak ketiga pun tidak bisa menolong dalam memperbaiki prasarana halte yang kerusakannya masih bisa lihat sampai sekarang.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan uraian dan data yang dikumpulkan oleh penulis tentang peranan Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan halte di Kota Samarinda dan dihubungkan dengan tujuan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda adalah, sebagai berikut :
  - a. Dalam pemeliharaan halte di Kota Samarinda yang memiliki tugas monitoring/pengawasan sejauh ini belum cukup baik dan maksimal karena Dinas Perhubungan kekurangan sumberdaya manusia atau pegawai sehingga belum mampu jika harus memonitoring banyaknya jumlah halte yang ada di Kota Samarinda.
  - b. Selain itu Dinas Perhubungan sebagai pengevaluasi pemeliharaan fisik halte belum cukup baik dikarenakan hanya mengandalkan rap (catatan kecil) pembukuan dari bahan monitoring yang belum jelas pengawasannya. Terlebih lagi dilakukan perbulan sangat rentan kesalahan dalam mengevaluasi. Pemanfaatan dari fungsi prasarana halte pun kini sudah menurun karena tidak ada ketentuan dari Dinas Perhubungan bagi masyarakat untuk menunggu angkutan umum di halte.
  - c. Dalam hal rehabilitasi Dinas Perhubungan juga belum melakukannya secara maksimal dan belum cukup baik karena masih ada hal yang perlu di prioritaskan untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran pemerintah Kota Samarinda jika harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk kegiatan pemeliharaan halte. Kondisi halte yang kurang tidak di rehabilitasi yang membuat masyarakat enggan menunggu angkutan umum di halte.
2. Faktor penghambat Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Halte di Kota Samarinda adalah, sebagai berikut :
  - a. Penghambat peranan Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan halte di Kota Samarinda dalam memonitoring adalah kurangnya tenaga sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sehingga belum mampu jika harus memonitoring banyaknya jumlah halte yang ada di Kota Samarinda. Karena tanpa ketersediaannya sumberdaya manusia yang cukup dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan

prasarana halte maka proses pemeliharaan juga akan tersendat sehingga menyebabkan kondisi halte menjadi kurang layak.

- b. Penghambat peranan Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan halte di Kota Samarinda dalam mengevaluasi adalah pemanfaatan dari fungsi prasarana halte kini sudah menurun karena tidak ada ketentuan dari Dinas Perhubungan bagi masyarakat untuk menunggu angkutan umum di halte, berkurangnya minat masyarakat dalam menggunakan fasilitas halte pun kini membuat bangunan halte beralih fungsi menjadi lapak bagi para PKL untuk menjajakan dagangannya. Kondisi ini dikarenakan masyarakat lebih memilih memakai kendaraan pribadi dibandingkan menunggu angkutan umum di halte.
- c. Faktor utama penghambat peranan Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan halte di Kota Samarinda dalam merehabilitasi adalah keterbatasan anggaran. Karena semua kegiatan mulai monitoring, evaluasi sampai pada rehabilitasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya. Sehingga Dinas Perhubungan memerlukan pihak ketiga seperti masyarakat dan para pengusaha untuk turut membantu merawat dan memelihara prasarana halte, tetapi tentu saja bantuan dari pihak ketiga pun tidak bisa menolong dalam memperbaiki prasarana halte yang kerusakannya masih bisa lihat sampai sekarang.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan terkait kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengingat kurangnya Sumberdaya Manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda diharapkan agar melakukan penambahan Sumberdaya Manusia sehingga dapat mengawasi prasarana halte dengan baik tidak hanya mengarpakan laporan langsung dari masyarakat dan pengawasan sekilas.
2. Sebaiknya pemeliharaan halte di Kota Samarinda dalam mengevaluasi diharapkan benar-benar mendapat laporan yang konkrit dari pengawasan. Bukan hanya mengandalkan rap (catatan kecil) pembukuan dari laporan masyarakat yang belum jelas kebenarannya. Kerjasama dan komunikasi antara pegawai juga perlu dalam menunjang evaluasi yang maksimal.
3. Sangat dibutuhkan bentuk kerjasama antar para pihak instansi terkait dalam kegiatan rehabilitasi ini, sehingga pendanaan atau investasi pemeliharaan fasilitas halte dapat terpenuhi dan kegiatan rehabilitasi diharapkan dapat dilaksanakan sepenuhnya agar pemeliharaan dan pembangunan halte di Kota Samarinda bisa maksimal.
4. Dinas Perhubungan perlu memberikan informasi, sosialisasi dan edukasi yang lebih kepada masyarakat terkait pemeliharaan halte, agar masyarakat lebih aktif menggunakan fasilitas halte yang telah disediakan pemerintah untuk memudahkan mencari angkutan umum. Selain itu harus ada pula

ketentuan berhenti di halte bagi angkutan umum agar tidak menurun dan naikan penumpang disebarkan tempat yang dapat menyebabkan kemacetan.

5. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan untuk menambahkan beberapa fasilitas di dalam prasarana halte seperti lampu penerangan agar jika pada waktu malam hari masyarakat pengguna halte bisa merasa lebih aman, nyaman dan tidak merasa ketakutan, serta penambahan bak sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan disekitar halte.
6. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan tidak perlu lagi menambah bangunan halte karena halte yang sudah ada saja tidak terpakai dan tidak terpelihara, pembangunan halte yang sia-sia hanya akan terkesan membuang-buang dana anggaran Pemerintah Kota.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik, Jakarta: Suara Bebas
- Anonim. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka
- Chanter B, *Building Maintenance Management*, Australia, Blackwell Science, 1996.4.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi), Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi & Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gibson, Ivancevich, Donell. 2001 *Organisasi*. Bina Rupa Aksara : Jakarta
- Herlambang, Susatyo. 2014. *Perilaku Organisasi Cara Mudah Mempelajari Perilaku Manusia Dalam Sebuah Organisasi*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim dan Juni Pranoto. 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Robert J. Kodoatie. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2010. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Third Edition. Sage Publications, Inc.
- Muhammad, Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Mukhlas, Makmuri. 2005. *Perilaku organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Narwoko, I Dwi. 2004. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Asli Metodologi*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyano. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik. (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Grasindo
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Rivai, Veithzal. 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ruslan, Richa. 2010. *Studi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Partisipasi Pembangunan di Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat*. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Sitorus, M. 2006. *SOSIOLOGI 2*. Jakarta: Gelora Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Subhki, Akhmad dan Mohammad Jauhar. 2013. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sudriamunawar, Haryono. 2002. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukidin dan Damai Darmadi. 2011. *Aministrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Yasin, Mahmuddin. 2013. *Membangun Organisasi Berbudaya Studi BUMN*. Bandung: Expese.

#### **DOKUMEN-DOKUMEN**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 02 tahun 2004
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda
- Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003

#### **SUMBER-SUMBER LAIN**

- <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/02/seputar-pengertian-pemeliharaan.html>
- <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-pemeliharaan-menurut-ahli.html>